



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 37 PALEMBANG  
TERAKREDITASI "A"

Jl. Taqwa Mata Merah Kel.Sel Selincah Kec. Kalidoni ☎ 715445, Kode Pos 30119  
Email : [redaksismpnegeri37palembang@gmail.com](mailto:redaksismpnegeri37palembang@gmail.com)



NSS : 201116002139  
NPSN : 10603763

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : PKN  
Hari/Tanggal : Rabu /3 Desember 2025  
Waktu : 10.40 -12.00 WIB  
Kelas : VIII

PETUNJUK UMUM

1. Tersedia waktu 80 menit untuk mengerjakan soal tersebut
2. Jumlah butir soal sebanyak 50 soal Pilihan Ganda
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya
4. Periksa salah pekerjaan Anda sebelum dikirimkan

**SELAMAT BEKERJA**

Pilihan Ganda

1. Pancasila berarti lima dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai empat sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan ...
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan praktik hidup yang dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan tidak bisa dipecah-pecah. Persatuan digambarkan oleh lambang negara *bhinneka tunggal ika* yang berarti bersatu dalam ....
3. Persatuan Indonesia mengandung persaudaraan yang diliputi suasana kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila ....
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat /kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/Perwakilan dengan dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan diatas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan ...
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila ketiga, keempat, dan kelima merupakan landasan ....
6. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sukarno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Sukarno menyatakan bahwa dasar negara dalam bahasa Belanda disebut *filosofische grondslag*. Artinya, fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara ....
7. Sukarno menyampaikan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. *Panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti asas atau dasar. Negara Indonesia berdiri di atas lima dasar. Pada kemudian hari, momen pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden ....
8. Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh ....
9. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi terdapat dalam...
10. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban Bagi kepentingan Negara dan bangsa. Mengembangkan rasa Kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia. Merupakan pencerminan pribadi yang mengamalkan sila Pancasila ke...

### Pilihan Ganda Kompleks

11. Perhatikan pernyataan berikut!

"... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Mengacu pada kalimat "... negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada ...." menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa ....

- ☐ Setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila
- ☐ Setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- ☐ Setiap aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan dan sesuai dengan Pancasila
- ☐ Setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

12. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, pada pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pada pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, negara berkewajiban ....

- ☐ Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memperoleh pekerjaan yang layak
- ☐ Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
- ☐ Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya
- ☐ Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memperoleh penghidupan yang layak

13. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengartikan bahwa tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan itu memunculkan komitmen negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keagungan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang, adil dan suci.

Oleh karena itu, tindakan negara harus diarahkan untuk ....

- ☐ Mengayomi dan melindungi rakyatnya
- ☐ Membela keadilan dan menentang kezaliman
- ☐ Menerapkan sistem bernegara secara jujur
- ☐ Menentang kecurangan

14. Negara memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban ....

- ☐ Membina rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengamalan ajaran agama
- ☐ Memberikan bimbingan kepada setiap umat beragama dan penganut kepercayaan di Indonesia agar dapat hidup rukun
- ☐ Bekerja sama (kesalehan sosial) demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama
- ☐ Menjamin pelaksanaan ibadah setiap agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

15. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, negara menghargai ....

- ☐ Keberagaman penduduknya dalam bingkai persatuan
- ☐ Negara memandang keberagaman tersebut sebagai modal untuk menciptakan kesatuan
- ☐ Negara memandang keberagaman demi tercapainya tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- ☐ Negara memandang keberagaman untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara

16. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan ....

- ☐ Keluarga
- ☐ Bermasyarakat
- ☐ Berbangsa
- ☐ Bernegara

17. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.

Ketika Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, seluruh nilai Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh bangsa Indonesia melalui ....

- ☐ Perilaku kehidupan sehari-hari
- ☐ Pemahaman
- ☐ Penghayatan
- ☐ Pengamalan dalam kehidupannya sehari-hari



18. Perhatikan gambar berikut!



Gambar tersebut menunjukkan ....

- ☐ Solidaritas sosial, sikap hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
  - ☐ Saling Membantu dan bekerja sama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sekolah
  - ☐ Solidaritas sosial, sikap hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
  - ☐ Saling membantu dan bekerja sama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di Sekolah
19. Secara bahasa, ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Artinya, ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarahkan pada cita-cita. Secara istilah, ideologi disimpulkan sebagai seperangkat konsep dan sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arah pada setiap warga negara dalam menjalani ....
- ☐ Kehidupan bermasyarakat
  - ☐ Kehidupan berbangsa
  - ☐ Kehidupan bernegara
  - ☐ Kehidupan dalam keluarga
20. Setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *Constitution* dan bahasa Belanda *Constitutie* yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk ....
- ☐ Membentuk suatu negara
  - ☐ Menyusun, atau menyatakan suatu negara
  - ☐ Mendirikan suatu negara
  - ☐ Mengesahkan suatu negara
21. Dalam tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan ....
- ☐ Sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia
  - ☐ Sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan
  - ☐ Landasan bagi semua undang-undang di Indonesia
  - ☐ Sumber dalam pembuatan undang-undang di Indonesia
22. Hasil Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan ....
- ☐ Mengesahkan UUD 1945
  - ☐ Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
  - ☐ Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
  - ☐ Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
23. Uji materi bermakna pengujian materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut adalah ....
- ☐ Mahkamah Agung
  - ☐ Mahkamah Konstitusi
  - ☐ DPR
  - ☐ MPR
24. Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang. Adapun fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
- ☐ Alat kontrol, apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945
  - ☐ Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  - ☐ Pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan
  - ☐ Arah dan cita dalam menyusun peraturan perundang-undangan
25. Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan bermacam cara, di antaranya adalah ....
- ☐ Aktif terlibat dalam kegiatan siskamling
  - ☐ Hidup rukun dengan tetangga
  - ☐ Saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan
  - ☐ Menjenguk tetangga yang sakit

## Menjodohkan

### 26. Pernyataan/ Gambar

Perhatikan gambar berikut!



Aturan yang dilaksanakan sesuai gambar adalah ....

a. Aturan sekolah

### 27. Pernyataan/ Gambar

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang mampu menampung banyak peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sukunya, bahasanya, agamanya, adatnya, maupun budayanya. Para guru dan staf administrasi juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda tersebut harus ada sesuatu yang mengikat atau sesuatu yang mengaturnya yang disebut dengan ....

b. Aturan keluarga

### 28. Pernyataan/ Gambar

Perhatikan gambar berikut!



Di sekolah terdapat aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik. Aturan-aturan tersebut berlaku untuk warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf pendukung. Aturan tersebut adalah ....

c. Aturan atau tata tertib

### 29. Pernyataan/ Gambar

Di masyarakat, terdapat aturan yang tujuannya juga sama, yaitu untuk kedisiplinan dan ketertiban bersama warga masyarakat. Di masyarakat, terdapat lembaga yang membuat aturan seperti di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. Di tingkat RT/RW, aturan dibuat oleh ketua RT/RW. Di desa atau kelurahan, aturan dibuat oleh kepala desa atau lurah. Di tingkat kecamatan, aturan dibuat oleh ....

d. Masyarakat

### 30. Pernyataan/ Gambar

Aturan atau tata tertib bertujuan untuk ketertiban, kedisiplinan, dan kenyamanan bersama. Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Peraturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara bersama-sama oleh anggota ....

e. UUD Negara RI tahun 1945

### 31. Pernyataan/ Gambar

Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan (hierarkis) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenjang atau berurutan yang paling atas adalah ....

f. Camat

### 32. Pernyataan/ Gambar

Suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai – nilai luhur. Merupakan nilai – nilai dasar dan luhur yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

g. Legislatif

### 33. Pernyataan/ Gambar

Pendelegasian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

h. Presidensiil

### 34. Pernyataan/ Gambar

Lembaga yang berwenang membuat Undang – Undang untuk menjalankan pemerintahan Negara.

i. Pandangan hidup bangsa

### 35. Pernyataan/ Gambar

Presiden berfungsi sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh Menteri, Menteri bertanggung jawab kepada presiden

j. Sistem desentralisasi



Drop and Drag

36.



Lembaga Yudikatif

37.



Asas Musyawarah

38.



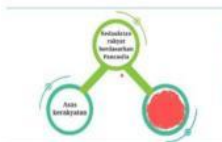
Menghormati teman  
yang beda agama  
perwujudan sila..

39.



Lembaga Pembuat  
Undang - Undang

40.



Rumusan Pancasila yang  
benar dan sah

41.



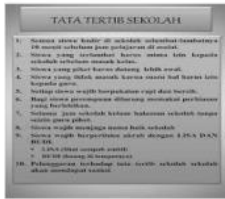
Di jalan Pegangsaan  
Timur No .56 Jakarta

42.



Sikap berani  
mengimplementasikan  
UUD 1945 dalam  
lingkup sekolah

43.



Implementasi Peraturan  
Perundang - undangan

44.



Salah satu tujuan negara  
mencerdaskan kehidupan  
bangsa

45.



Peraturan yang dibuat  
untuk ditaati dan  
dilaksanakan oleh seluruh  
warga sekolah

## Melengkapi kalimat

46. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandemen, Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat ..
47. Pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 setelah diamandemen menjadi, kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut, ..
48. Dalam pelaksanaan system pemerintahan parlementer, Presiden/ Raja / Ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berfungsi sebagai,
49. Menurut AV. Dicey sebagai mana dikutip oleh Jimmy Asshiddiqie, ciri negara hukum ada tiga yaitu Supremasi hukum, Persamaan dalam hukum dan,
50. Selain UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR (TAP MPR) merupakan aturan hukum kedua setelah UUD NRI Tahun 1945. Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Hal itu ditegaskan dalam UU No. 15/2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan ..